

IMPLEMENTASI KONSEP KHALIFAH SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN SEKOLAH INKLUSI DI SDN PORIS PELAWAD 5 KOTA TANGERANG

Muhamad Fadil Kamal¹, Arfiah², Dwi Rifka Maulina³, Fetrimen⁴

^{1,2,3,4}Universitas Prof. DR. Hamka, Indonesia

e-mail: contact.fadilkml@gmail.com¹, arfiah41@gmail.com²,
dwirifka23@gmail.com³, fetrimen@uhamka.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep khalifah sebagai landasan pengembangan sekolah inklusi di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan pendidikan inklusif di Indonesia yang sering kali masih dipahami sebatas pemenuhan administratif dan penyediaan layanan teknis, sementara dimensi nilai, spiritualitas, dan tanggung jawab kemanusiaan belum memperoleh perhatian yang memadai. Dalam konteks tersebut, konsep khalifah dalam pendidikan Islam dipandang memiliki relevansi penting karena mengandung dimensi tanggung jawab moral, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengembangan sikap empatik terhadap keberagaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus, serta peserta didik. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep khalifah di SDN Poris Pelawad 5 tercermin dalam budaya sekolah yang menempatkan seluruh peserta didik sebagai amanah yang harus dihargai tanpa diskriminasi. Nilai keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman diinternalisasikan melalui pembelajaran adaptif, budaya sekolah inklusif, interaksi sosial peserta didik, serta pola kepemimpinan sekolah yang humanis. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi konsep khalifah berkontribusi terhadap peningkatan empati dan toleransi siswa, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, dan dukungan sistemik. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep khalifah sebagai paradigma filosofis dalam pengembangan pendidikan inklusif berbasis nilai Islam humanistik.

Kata Kunci: Humanisme Pendidikan, Khalifah, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Islam, Sekolah Inklusi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the khalifah concept as the foundation for developing inclusive education at SDN Poris Pelawad 5 Tangerang City. The research is motivated by the increasing demand for inclusive education in Indonesia, which is often limited to administrative compliance and technical services, while the dimensions of values, spirituality, and humanitarian responsibility remain underexplored. In this context, the Islamic concept of khalifah is considered highly relevant because it contains dimensions of moral responsibility, social justice, respect for human dignity, and the development of empathy toward diversity. This study employed a qualitative approach with a case study design and interpretive paradigm. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the principal, classroom teachers, special assistant teachers, and students. Data analysis used the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the khalifah concept at SDN Poris Pelawad 5 is reflected in a school culture that positions all students as a trust that must be respected without discrimination. Values of justice, responsibility, social care, and respect for diversity are internalized through adaptive learning, inclusive school culture, student social interaction, and humanistic school leadership. The study also found that the implementation of the khalifah concept contributes to increasing students' empathy and tolerance, although challenges remain in terms of limited facilities, teacher competence, and systemic support. The novelty of this research lies in integrating the khalifah concept as a philosophical paradigm for developing inclusive education based on Islamic humanistic values.

Keywords: Educational Humanism, Khalifah, Inclusive Education, Islamic Education, Inclusive School

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, negara terus mendorong perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi melalui berbagai regulasi dan kebijakan (UNESCO, 2020). Di sisi lain, praktik pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi beragam tantangan, baik yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, budaya sekolah, fasilitas pendukung, maupun paradigma pendidikan itu sendiri (Fadli, 2022). Pendidikan inklusif sering kali dipahami secara administratif sebagai kewajiban menerima peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, tetapi belum sepenuhnya dimaknai sebagai proses transformasi nilai dan budaya pendidikan yang menghargai keberagaman manusia secara utuh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembelajaran, melainkan juga menyentuh dimensi filosofis dan moral pendidikan. Sekolah inklusi sejatinya bukan sekadar ruang fisik yang membuka akses bagi semua anak, tetapi juga ruang kemanusiaan yang menempatkan setiap individu sebagai subjek pendidikan yang bermartabat (Banks, 2021). Dalam konteks ini, pendidikan membutuhkan landasan nilai yang mampu menumbuhkan kesadaran etis tentang pentingnya keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan

tanggung jawab sosial.

Di tengah tantangan tersebut, pendidikan Islam memiliki sumber nilai yang kaya untuk membangun paradigma pendidikan inklusif yang lebih humanis. Salah satu konsep penting dalam Islam adalah konsep khalifah. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai kepemimpinan manusia di muka bumi, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan, memelihara kemanusiaan, dan membangun relasi sosial yang penuh kasih sayang (Hasanah, 2022). Dalam Al-Qur'an, manusia ditempatkan sebagai khalifah yang memiliki amanah untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dengan demikian, konsep khalifah memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai pendidikan inklusif yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan penerimaan terhadap keberagaman.

Namun demikian, kajian tentang hubungan antara konsep khalifah dan pendidikan inklusif masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian pendidikan inklusif di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan, strategi pembelajaran, kompetensi guru, atau hambatan teknis implementasi pendidikan inklusi (Hidayati, 2021). Penelitian yang mengintegrasikan konsep-konsep filosofis pendidikan Islam ke dalam praktik pendidikan inklusif masih belum banyak dikembangkan. Akibatnya, pendidikan inklusif sering berjalan tanpa fondasi nilai yang kokoh, sehingga implementasinya cenderung bersifat prosedural.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengembangan sekolah inklusi membutuhkan budaya sekolah yang suportif dan kepemimpinan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan (Fitria & Rahman, 2023). Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana konsep khalifah dapat diinternalisasikan dalam budaya sekolah inklusi sebagai landasan moral dan spiritual pendidikan. Di sinilah letak research gap penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya membahas pendidikan inklusif dari sisi teknis pembelajaran, tetapi juga menempatkan konsep khalifah sebagai paradigma nilai yang membentuk budaya sekolah, relasi sosial, dan praktik pendidikan.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep khalifah dalam pendidikan Islam dengan praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa pendidikan inklusif tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan psikologis dan pedagogis, tetapi juga melalui pendekatan filosofis-spiritual yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus diperlakukan secara adil (Rahman, 2021). Konsep khalifah diposisikan sebagai kerangka etik yang memperkuat pendidikan inklusif berbasis nilai Islam humanistik.

SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah inklusi yang berupaya membangun budaya pendidikan yang menerima keberagaman peserta didik. Sekolah ini tidak hanya menghadapi tantangan teknis terkait layanan inklusif, tetapi juga berupaya menanamkan nilai kepedulian, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan kepada peserta didik. Kondisi tersebut menjadikan sekolah ini menarik untuk dikaji dalam perspektif implementasi konsep khalifah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep khalifah sebagai landasan pengembangan sekolah inklusi di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian diinternalisasikan dalam

budaya sekolah, proses pembelajaran, dan interaksi sosial peserta didik.

Konsep khalifah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan (Nata, 2020). Secara etimologis, khalifah berarti pengganti, pemimpin, atau wakil. Dalam Al-Qur'an, manusia disebut sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, menegakkan keadilan, dan memelihara kehidupan.

Dalam konteks pendidikan, konsep khalifah tidak dapat dipahami sebatas relasi kekuasaan atau kepemimpinan formal. Konsep ini justru mengandung makna pedagogis yang mendalam karena menempatkan manusia sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual (Hasanah, 2022). Pendidikan berbasis konsep khalifah berorientasi pada pembentukan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etik, empati sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Pemikiran pendidikan Islam kontemporer menjelaskan bahwa konsep khalifah berkaitan erat dengan pengembangan potensi fitrah manusia. Setiap manusia dipandang memiliki nilai dan martabat yang setara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak boleh melahirkan diskriminasi ataupun marginalisasi terhadap kelompok tertentu, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (Arifin, 2021). Dalam perspektif ini, pendidikan inklusif sebenarnya memiliki titik temu yang kuat dengan konsep khalifah.

Selain itu, konsep khalifah juga berkaitan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menempatkan Islam sebagai ajaran yang menghadirkan kasih sayang dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pendidikan yang berlandaskan konsep khalifah tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membangun budaya penghormatan terhadap keberagaman dan solidaritas sosial.

Konsep khalifah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara etimologis, khalifah berarti pengganti, pemimpin, atau wakil. Dalam Al-Qur'an, manusia disebut sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, menegakkan keadilan, dan memelihara kehidupan.

Dalam konteks pendidikan, konsep khalifah tidak dapat dipahami sebatas relasi kekuasaan atau kepemimpinan formal. Konsep ini justru mengandung makna pedagogis yang mendalam karena menempatkan manusia sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Pendidikan berbasis konsep khalifah berorientasi pada pembentukan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etik, empati sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Pemikiran pendidikan Islam kontemporer menjelaskan bahwa konsep khalifah berkaitan erat dengan pengembangan potensi fitrah manusia. Setiap manusia dipandang memiliki nilai dan martabat yang setara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak boleh melahirkan diskriminasi ataupun marginalisasi terhadap kelompok tertentu, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam perspektif ini, pendidikan inklusif sebenarnya memiliki titik temu yang kuat dengan konsep khalifah.

Selain itu, konsep khalifah juga berkaitan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menempatkan Islam sebagai ajaran yang menghadirkan kasih sayang dan

kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pendidikan yang berlandaskan konsep khalifah tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membangun budaya penghormatan terhadap keberagaman dan solidaritas sosial.

Pendidikan inklusif berkembang sebagai respons terhadap praktik pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif. UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, bahasa, budaya, maupun latar belakang ekonomi.

Dalam praktiknya, pendidikan inklusif bukan sekadar integrasi peserta didik berkebutuhan khusus ke sekolah reguler. Pendidikan inklusif menuntut perubahan paradigma pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, budaya sekolah, hingga cara pandang guru terhadap peserta didik. Sekolah inklusi harus menjadi ruang yang menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi seluruh siswa secara setara.

Konsep pendidikan inklusif memiliki keterkaitan erat dengan humanisme pendidikan. Pendidikan humanistik menempatkan manusia sebagai makhluk yang unik, memiliki potensi, dan harus diperlakukan secara bermartabat. Dalam pendidikan humanistik, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu perkembangan emosional, sosial, dan moral peserta didik.

Perspektif humanistik dalam pendidikan inklusif menjadi penting karena peserta didik berkebutuhan khusus sering kali mengalami stigma dan marginalisasi. Oleh sebab itu, pendidikan inklusif membutuhkan budaya sekolah yang menumbuhkan empati, penghormatan, dan solidaritas sosial.

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam pendidikan inklusif. Pendidikan yang adil bukan berarti memperlakukan semua peserta didik secara sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka, melainkan memberikan layanan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing individu. Dalam konteks pendidikan inklusif, keadilan sosial diwujudkan melalui akses pendidikan yang setara, pembelajaran adaptif, serta penghapusan diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif juga menuntut adanya transformasi budaya sekolah agar seluruh warga sekolah memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati keberagaman. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial merupakan nilai fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari konsep khalifah. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif berbasis konsep khalifah dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan pendidikan yang berlandaskan nilai spiritual dan kemanusiaan.

Kajian mengenai pendidikan inklusif di Indonesia telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif, mulai dari aspek kebijakan, manajemen sekolah, kompetensi guru, hingga strategi pembelajaran. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pendekatan teknis dan administratif, sementara dimensi filosofis dan spiritual pendidikan inklusif relatif belum memperoleh perhatian yang mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2022) dalam Jurnal Administrasi Pendidikan menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, minimnya media pembelajaran adaptif, serta rendahnya kesiapan guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan

husus. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan sekolah, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya sekolah yang suportif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayati (2021) dalam Jurnal Pendidikan Khusus menemukan bahwa kompetensi pedagogik guru menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran inklusif. Guru yang memiliki pemahaman tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus cenderung lebih mampu menciptakan pembelajaran yang adaptif dan humanis. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pedagogis dan belum mengaitkannya dengan dimensi nilai atau spiritualitas pendidikan.

Fitria dan Rahman (2023) melalui penelitiannya tentang budaya sekolah inklusi menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif dapat membangun interaksi sosial yang lebih sehat antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kepemimpinan sekolah yang terbuka terhadap keberagaman dan partisipasi seluruh warga sekolah dalam membangun budaya inklusif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan transformasi budaya sekolah, bukan sekadar perubahan sistem administrasi pendidikan.

Sementara itu, penelitian Aziz dan Hidayat (2023) mengenai inclusive education and Islamic values in Indonesian schools menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dalam membangun pendidikan inklusif berbasis penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian tersebut menyoroti bahwa ajaran Islam mengandung prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan yang dapat menjadi fondasi pendidikan inklusif. Namun, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas konsep khalifah sebagai paradigma pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam humanistik, Rahman (2021) menjelaskan bahwa pendidikan Islam seharusnya diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki kesadaran etik, empati sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter humanis. Pandangan ini memiliki keterhubungan dengan pendidikan inklusif yang menempatkan penghormatan terhadap manusia sebagai prinsip utama.

Penelitian Baharun (2020) mengenai pendidikan inklusif dalam perspektif Islam juga menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang inklusif terhadap keberagaman manusia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam pada hakikatnya menolak diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Akan tetapi, kajian tersebut masih berada pada level konseptual dan belum membahas implementasi nilai Islam dalam praktik sekolah inklusi secara konkret.

Selain penelitian jurnal, terdapat pula beberapa penelitian tesis dan skripsi yang membahas implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. Penelitian tesis oleh Nurhayati (2022) di Universitas Negeri Jakarta menunjukkan bahwa budaya sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Penelitian tersebut menemukan bahwa lingkungan sekolah yang suportif mampu meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi sosial peserta didik.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai

keagamaan dapat memperkuat sikap empati dan toleransi siswa terhadap teman berkebutuhan khusus. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menyoroti pendidikan karakter secara umum dan belum mengembangkan konsep khalifah sebagai kerangka filosofis pendidikan inklusif.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif membutuhkan dukungan budaya sekolah, kompetensi guru, dan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Akan tetapi, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan konsep khalifah dengan praktik pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada dimensi teknis pembelajaran dan manajemen sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus memperlihatkan novelty yang lebih jelas. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi pendidikan inklusif dari sisi pedagogis, tetapi juga mengkaji bagaimana konsep khalifah diinternalisasikan dalam budaya sekolah, praktik pembelajaran, relasi sosial, dan pembentukan nilai empati di sekolah inklusi. Penelitian ini juga berupaya menghadirkan sintesis antara pendidikan Islam humanistik dan pendidikan inklusif dalam konteks sekolah dasar negeri di Indonesia.

Penelitian ini dibangun di atas asumsi dasar bahwa pendidikan inklusif tidak dapat berkembang secara optimal apabila hanya dipahami sebagai sistem layanan pendidikan yang bersifat administratif dan teknis. Pendidikan inklusif membutuhkan fondasi filosofis dan etik yang mampu membentuk cara pandang sekolah terhadap manusia, keberagaman, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, konsep khalifah dalam pendidikan Islam diposisikan sebagai paradigma nilai yang dapat menjadi landasan pengembangan sekolah inklusi. Konsep khalifah memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, tanggung jawab moral, dan amanah sosial untuk menciptakan kehidupan yang adil serta penuh kemaslahatan. Perspektif ini memiliki keterhubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan hak pendidikan, dan penghapusan diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, penelitian ini memandang bahwa implementasi konsep khalifah tidak hanya berkaitan dengan pendidikan agama secara formal, tetapi juga menyangkut transformasi nilai dalam budaya sekolah, relasi sosial, dan praktik pembelajaran.

Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu konsep khalifah dalam pendidikan Islam, pendidikan humanistik, dan pendidikan inklusif. Konsep khalifah menjadi fondasi etik-spiritual yang menekankan nilai tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan penghormatan terhadap manusia. Pendidikan humanistik menjadi pendekatan pedagogis yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki potensi dan hak untuk berkembang secara utuh. Sementara itu, pendidikan inklusif menjadi ruang praksis yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem pendidikan yang menghargai keberagaman. Dalam kerangka ini, kepala sekolah dipandang memiliki peran sentral sebagai pemimpin moral yang membangun budaya sekolah berbasis nilai kemanusiaan. Kepemimpinan sekolah yang humanis menjadi faktor penting dalam membentuk iklim sekolah yang menerima keberagaman peserta didik tanpa diskriminasi. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak nilai yang mendorong guru dan peserta didik

untuk membangun relasi sosial yang lebih inklusif.

Selain itu, guru diposisikan sebagai aktor utama dalam internalisasi nilai khalifah di lingkungan sekolah. Implementasi konsep khalifah pada level guru tercermin melalui sikap empatik, kesabaran, tanggung jawab moral, serta kemampuan membangun pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam perspektif ini, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk pengalaman belajar yang memanusiakan manusia. Kerangka konseptual penelitian ini juga menempatkan budaya sekolah sebagai ruang penting dalam pembentukan nilai inklusif. Budaya sekolah yang mendukung keberagaman akan menciptakan interaksi sosial yang lebih sehat antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Interaksi tersebut menjadi medium penting dalam pembentukan empati, toleransi, dan solidaritas sosial peserta didik.

Lebih jauh, implementasi konsep khalifah dalam pendidikan inklusif dipahami sebagai proses transformasi nilai Islam ke dalam praktik pendidikan kontemporer. Nilai keadilan dalam konsep khalifah diwujudkan melalui pemberian hak belajar yang setara kepada seluruh peserta didik. Nilai tanggung jawab diwujudkan melalui komitmen guru dan sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara itu, nilai kepedulian diwujudkan melalui pembentukan budaya sosial yang menghargai keberagaman. Kerangka penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga dari sejauh mana sekolah mampu membangun lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, implementasi konsep khalifah dipahami sebagai upaya membangun pendidikan yang tidak hanya inklusif secara struktural, tetapi juga inklusif secara moral dan kultural.

Melalui kerangka konseptual tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa hubungan antara konsep khalifah dan pendidikan inklusif bersifat substantif. Konsep khalifah tidak hanya menjadi legitimasi normatif dalam pendidikan Islam, tetapi juga menjadi paradigma filosofis yang dapat memperkuat praktik pendidikan inklusif berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Creswell, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam fenomena implementasi konsep khalifah dalam konteks pendidikan inklusif di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. Paradigma interpretatif digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada fakta empiris, tetapi juga pada makna, pengalaman, dan interpretasi sosial yang dibangun oleh subjek penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. Sekolah ini dipilih karena merupakan sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan memiliki upaya pengembangan budaya sekolah berbasis nilai kemanusiaan.

Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus, serta peserta didik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Moleong, 2021). Observasi dilakukan untuk memahami budaya sekolah, interaksi sosial, serta praktik pembelajaran inklusif. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai implementasi konsep khalifah dan tantangan pendidikan inklusif. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data penelitian melalui analisis program sekolah, foto kegiatan, dan dokumen pembelajaran.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data berlangsung. Peneliti melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama seperti nilai keadilan, tanggung jawab guru, budaya sekolah inklusif, dan hambatan implementasi.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Konsep Khalifah dalam Budaya Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep khalifah di SDN Poris Pelawad 5 tidak diwujudkan secara formal melalui istilah-istilah teologis yang eksplisit, melainkan hadir dalam praktik budaya sekolah sehari-hari. Kepala sekolah menegaskan bahwa pendidikan inklusif harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral sekolah dalam memberikan hak belajar yang sama kepada seluruh peserta didik.

Kepala sekolah, Mumun Wahyuni, S.Pd., dalam wawancara menyampaikan:

“Sekolah inklusi itu bukan hanya menerima anak berkebutuhan khusus lalu selesai. Kami harus memastikan mereka merasa diterima, dihargai, dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kami memandang semua anak sebagai amanah yang harus dijaga bersama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian penting dalam budaya sekolah. Kepala sekolah menekankan bahwa seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, merupakan amanah yang harus diperlakukan dengan hormat dan penuh tanggung jawab.

Nilai tersebut tercermin dalam kebijakan sekolah yang berupaya menghindari diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah tidak memisahkan mereka secara sosial dari siswa lain, melainkan mendorong interaksi yang alami dan suportif di lingkungan kelas. Dalam beberapa kegiatan sekolah, peserta didik dilibatkan bersama tanpa pembatasan yang mencolok.

Guru-guru juga menunjukkan kesadaran bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar kewajiban administratif. Mereka memandang proses mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

Guru kelas, Siti Khoirunisa, S.Pd., menjelaskan:

“Kadang memang tidak mudah karena kemampuan anak berbeda-beda, tetapi kami belajar untuk lebih sabar. Anak-anak ini tidak bisa dipaksa sama seperti siswa lain.

Mereka perlu pendekatan yang lebih personal dan penuh perhatian.”

Guru pendamping inklusi, Karim Maulana, S.Pd., juga menyampaikan bahwa proses pendidikan inklusif membutuhkan kerja sama seluruh warga sekolah.

“Yang paling penting sebenarnya bukan hanya metode belajar, tetapi bagaimana sekolah membangun rasa peduli. Kalau lingkungan sekolah menerima mereka dengan baik, anak-anak juga akan merasa lebih percaya diri.” Mereka memandang proses mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Salah satu guru menyampaikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar dan dihargai sesuai kemampuannya.

Implementasi konsep khalifah juga terlihat dalam cara sekolah membangun budaya empati. Guru secara konsisten mengajarkan siswa untuk saling membantu dan menghargai perbedaan. Dalam kegiatan pembelajaran kelompok, siswa diajak untuk bekerja sama tanpa membedakan kondisi teman-temannya.

Pembelajaran Inklusif yang Adaptif

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SDN Poris Pelawad 5 bersifat cukup adaptif. Guru melakukan penyesuaian metode pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Pada beberapa kasus, guru memberikan penjelasan tambahan atau pendampingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar.

Guru pendamping khusus memiliki peran penting dalam membantu proses adaptasi pembelajaran. Mereka bekerja sama dengan guru kelas untuk menentukan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel. Meski demikian, adaptasi pembelajaran belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan waktu dan jumlah tenaga pendamping.

Dalam praktiknya, pembelajaran inklusif di sekolah ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik. Guru juga memberikan perhatian terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa. Sikap saling menghargai dan membantu menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari.

Beberapa siswa reguler menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Mereka membantu ketika temannya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran atau aktivitas sekolah.

Ika Mirna Sari(6B) menyampaikan:

“Kalau ada teman yang belum mengerti pelajaran, biasanya kami bantu. Kadang ada yang sulit membaca atau lambat menulis, jadi kami temani supaya dia tidak sedih.”

Nurhalizah (6B) juga mengungkapkan bahwa keberadaan teman berkebutuhan khusus membuat mereka belajar tentang kesabaran dan kepedulian.

“Awalnya saya bingung bagaimana harus bergaul, tapi lama-lama jadi terbiasa. Sekarang saya merasa semua teman harus diajak bermain bersama supaya tidak merasa sendirian.”

Abdillah Nur Maulana (5A) juga menyampaikan bahwa suasana belajar di kelas membuat siswa lebih terbiasa menghargai perbedaan.

“Kalau ada teman yang kesulitan, guru selalu bilang supaya kami membantu dan tidak mengejek. Jadi kami belajar untuk lebih peduli.”

Mela Auliani (5B) mengungkapkan bahwa kegiatan kelompok di kelas membuat siswa lebih dekat dengan teman-teman berkebutuhan khusus.

“Biasanya kalau kerja kelompok kami dicampur semua. Jadi kami belajar bersama dan saling membantu.”

Radit Prasetyo (4A) juga menjelaskan bahwa guru sering memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati semua teman.

“Guru selalu bilang kalau semua teman harus dihargai walaupun berbeda-beda. Jadi kami tidak boleh membeda-bedakan teman.”

Situasi ini menunjukkan bahwa budaya inklusif mulai tumbuh dalam interaksi sosial peserta didik. Mereka membantu ketika temannya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran atau aktivitas sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa budaya inklusif mulai tumbuh dalam interaksi sosial peserta didik. Budaya Sekolah yang Mendukung Keberagaman

Budaya sekolah di SDN Poris Pelawad 5 menunjukkan kecenderungan yang mendukung keberagaman. Sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh peserta didik. Kepala sekolah dan guru berusaha membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua siswa, terutama terkait perkembangan anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, sekolah juga menanamkan nilai toleransi melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari. Guru tidak hanya menekankan disiplin akademik, tetapi juga sikap menghormati sesama. Dalam beberapa kesempatan, guru mengaitkan pentingnya membantu teman dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Meski demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya inklusif belum sepenuhnya terbentuk secara ideal. Masih terdapat beberapa siswa yang sesekali menunjukkan sikap kurang sabar terhadap teman berkebutuhan khusus. Namun, guru berupaya melakukan pendekatan persuasif agar siswa memahami pentingnya empati dan penghargaan terhadap perbedaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi konsep khalifah dalam pengembangan sekolah inklusi meliputi komitmen kepala sekolah, kepedulian guru, serta budaya sekolah yang relatif terbuka terhadap keberagaman. Dukungan emosional antar guru juga menjadi faktor penting dalam menjaga semangat implementasi pendidikan inklusif.

Di sisi lain, penelitian menemukan beberapa faktor penghambat. Salah satu guru mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas dan minimnya pelatihan menjadi tantangan yang cukup dirasakan.

“Kadang kami ingin memberikan pembelajaran yang lebih maksimal, tetapi fasilitas masih terbatas. Selain itu, tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan inklusi sehingga masih perlu banyak belajar.”

Kepala sekolah juga mengakui bahwa dukungan sistemik masih menjadi tantangan dalam pengembangan sekolah inklusi.

“Komitmen sekolah saja sebenarnya belum cukup. Kami membutuhkan dukungan fasilitas, pelatihan guru, dan perhatian dari pemerintah agar layanan inklusi bisa berjalan lebih optimal.” Keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala utama, terutama terkait media pembelajaran dan sarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, kompetensi guru dalam menangani kebutuhan belajar yang beragam masih perlu ditingkatkan.

Kendala lain berkaitan dengan beban administrasi guru yang cukup tinggi sehingga memengaruhi optimalisasi pembelajaran adaptif. Beberapa guru mengakui bahwa mereka masih membutuhkan pelatihan khusus mengenai strategi pembelajaran

inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep khalifah di SDN Poris Pelawad 5 memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai pendidikan inklusif. Konsep khalifah tidak hanya dipahami sebagai wacana normatif keagamaan, tetapi diinternalisasikan dalam praktik pendidikan yang menekankan tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial (Darmawan, 2024).

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif akan lebih bermakna ketika dibangun di atas fondasi nilai yang kuat. Selama ini, sebagian praktik pendidikan inklusif di Indonesia cenderung berfokus pada aspek administratif dan teknis. Akibatnya, implementasi pendidikan inklusif sering mengalami stagnasi karena tidak diiringi perubahan paradigma pendidikan. Dalam konteks tersebut, konsep khalifah menawarkan perspektif filosofis yang memperkuat dimensi etik pendidikan inklusif.

Konsep khalifah dalam penelitian ini tercermin melalui kesadaran guru bahwa mendidik seluruh peserta didik merupakan amanah moral. Kesadaran tersebut mendorong guru untuk lebih sabar, empatik, dan terbuka terhadap keberagaman kemampuan siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan pendidikan Islam humanistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat (Choiri & Yusuf, 2022).

Lebih jauh, implementasi konsep khalifah juga menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan layanan akademik, tetapi juga pembangunan budaya sosial sekolah. Budaya sekolah yang mendukung keberagaman menjadi faktor penting dalam membentuk sikap toleransi peserta didik. Ketika siswa terbiasa berinteraksi dengan teman yang berbeda kondisi, mereka belajar memahami makna empati dan solidaritas sosial secara nyata (Ningsih, 2023).

Temuan ini relevan dengan teori pendidikan humanistik yang menekankan pentingnya relasi interpersonal dalam proses pendidikan (Freire, 2021). Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia yang mampu menghargai sesama. Dalam konteks sekolah inklusi, relasi sosial yang positif menjadi fondasi penting bagi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan suportif.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif berbasis nilai Islam masih menghadapi tantangan struktural. Keterbatasan fasilitas dan kompetensi guru menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak dapat berjalan hanya dengan semangat moral semata. Diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sistem pendidikan agar implementasi inklusi dapat berlangsung secara optimal.

Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan makna penting dari transformasi nilai yang terjadi di sekolah. Justru di tengah keterbatasan itulah tampak bahwa pendidikan inklusif membutuhkan komitmen etik dan kemanusiaan yang kuat. Guru tidak hanya bekerja sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai aktor moral yang membentuk budaya sekolah.

Interpretasi filosofis dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep khalifah dapat dipahami sebagai paradigma pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan berbasis konsep khalifah tidak melihat peserta didik dari keterbatasannya, tetapi dari martabat kemanusiaannya. Perspektif ini penting karena stigma terhadap anak berkebutuhan khusus sering muncul akibat cara pandang pendidikan yang terlalu menekankan standar akademik semata.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, penelitian ini memiliki relevansi yang cukup signifikan. Pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi persoalan diskriminasi, minimnya kesiapan sekolah, dan lemahnya budaya inklusif. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan inklusif tidak cukup dilakukan melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui internalisasi nilai kemanusiaan dan spiritualitas pendidikan.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa nilai Islam memiliki potensi besar untuk memperkuat pendidikan inklusif. Selama ini, diskursus pendidikan inklusif sering didominasi pendekatan psikologis dan pedagogis Barat. Padahal, pendidikan Islam memiliki konsep-konsep etik yang sangat relevan untuk membangun pendidikan yang lebih humanis dan adil (Nasution, 2024).

Dengan demikian, implementasi konsep khalifah dalam pengembangan sekolah inklusi dapat dipahami sebagai bentuk transformasi nilai Islam dalam praktik pendidikan kontemporer. Konsep ini tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi diwujudkan dalam budaya sekolah, interaksi sosial, dan praktik pembelajaran yang menghargai keberagaman manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep khalifah di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang berkontribusi terhadap pengembangan budaya sekolah inklusif yang lebih humanis dan berkeadilan. Konsep khalifah diinternalisasikan melalui nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penerimaan terhadap keberagaman peserta didik.

Implementasi tersebut tercermin dalam budaya sekolah yang mendukung interaksi inklusif, pembelajaran yang adaptif, serta sikap guru yang menempatkan pendidikan sebagai amanah moral. Nilai-nilai tersebut juga berdampak pada meningkatnya empati dan toleransi siswa terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan fasilitas dan kompetensi guru. Oleh sebab itu, pengembangan sekolah inklusi membutuhkan dukungan sistemik yang lebih kuat agar nilai-nilai inklusif dapat diwujudkan secara optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep khalifah memiliki relevansi penting sebagai landasan filosofis pendidikan inklusif berbasis nilai Islam humanistik. Pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga fondasi etik dan spiritual yang mampu membangun budaya pendidikan yang menghargai kemanusiaan.

DAFTAR PUSAKA

- Arifin, Z. (2021). Pendidikan Islam humanistik dalam pengembangan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 120–135.
- Aziz, A., & Hidayat, M. (2023). Inclusive education and Islamic values in Indonesian schools. *International Journal of Inclusive Education*, 27(5), 622–639.
- Baharun, H. (2020). Pendidikan inklusif dalam perspektif Islam. *Edukasia Islamika*, 5(1), 44–58.
- Banks, J. A. (2021). Diversity and citizenship education in global perspectives. *Educational Research Review*, 18(3), 201–219.

- Booth, T., & Ainscow, M. (2021). *The index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
- Choiri, M., & Yusuf, M. (2022). Humanistic Islamic education and inclusive learning. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(2), 313–327.
- Creswell, J. W. (2020). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Darmawan, D. (2024). Social justice in inclusive education practices in Indonesia. *Journal of Social Education*, 15(1), 52–68.
- Fadli, M. (2022). Pendidikan inklusi dan tantangan implementasinya di sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(1), 77–90.
- Fitria, N., & Rahman, A. (2023). School culture and inclusive education in Indonesian elementary schools. *International Journal of Educational Studies*, 12(4), 411–428.
- Freire, P. (2021). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Hasanah, U. (2022). Konsep khalifah dalam pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 17(2), 201–216.
- Hidayati, S. (2021). Teacher competence in inclusive schools. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 8(1), 33–49.
- Lickona, T. (2020). *Character matters*. New York: Simon & Schuster.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen pendidikan inklusif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. (2024). Islamic educational values and inclusive school transformation. *Journal of Islamic Education Research*, 9(1), 88–104.
- Nata, A. (2020). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ningsih, T. (2023). Empathy and tolerance in inclusive classrooms. *Journal of Educational Psychology*, 14(2), 211–227.
- Nurhayati, S. (2022). *Budaya sekolah dan perkembangan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi*. Tesis. Universitas Negeri Jakarta.
- Prasetyo, A. (2023). *Pendidikan berbasis nilai keagamaan dalam membangun empati siswa pada sekolah inklusi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, F. (2021). Islamic humanism and educational transformation. *Al-Tarbiyah Journal*, 11(3), 150–168.
- Salim, A. (2025). Moral responsibility of teachers in inclusive education. *Journal of Inclusive Pedagogy*, 6(1), 1–16.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. (2021). *Pendidikan Islam dan neurosains humanistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Inclusion and education*. Paris: UNESCO Publishing.

Yusuf, M., & Kurniawan, H. (2024). Inclusive school leadership and value-based education. *Journal of Educational Leadership*, 19(2), 301–319.